

ABSTRAK

Indonesia, dengan keanekaragaman geografis yang luar biasa dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan yang semakin meningkat akibat padat penduduk dan krisis sampahnya. Dengan lebih dari 270 juta jiwa yang mendiami lebih dari 17 ribu pulau, pertumbuhan penduduk yang pesat telah menciptakan tekanan signifikan pada infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah sampah. Urbanisasi yang cepat meningkatkan volume sampah yang dihasilkan, menciptakan tekanan besar pada sistem manajemen sampah yang ada. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi besar terhadap peningkatan produksi sampah, mendorong perlunya solusi inovatif dan berkelanjutan. Sampah, yang kehilangan nilai dan manfaatnya seiring waktu, menjadi hambatan bagi lingkungan. Oleh karena itu, penanganan sampah merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Selain masalah padat penduduk dan sampah, Indonesia juga menghadapi tantangan hukum yang memerlukan kerangka hukum yang kuat dan efektif. Regulasi yang tepat diperlukan untuk keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945. Indonesia telah mengambil langkah penting dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Situbondo, sebuah kabupaten di Jawa, menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mengelola limbah dengan tingginya produksi sampah. Petugas sampah di Situbondo mengangkut 45 ton sampah rumah tangga tiap hari dari TPS ke TPA. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, penanganan sampah di Kabupaten Situbondo masih belum optimal, terutama dalam proses pemindahan sampah dari sumbernya ke TPA. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat membuang sampah secara tidak tepat, seperti ke sungai atau selokan, menimbun sampah di lokasi yang tidak semestinya, dan membakar sampah yang menyebabkan polusi udara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan jenis penelitian hukum empiris yang memeriksa pelaksanaan prinsip-prinsip hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan responden dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah dan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan evaluasi bagi pemerintah dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah, serta membangun kesadaran masyarakat untuk membuang dan mengelola sampah dengan cara yang efektif dan sesuai standar.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Pertumbuhan penduduk, Keberlanjutan lingkungan.

